



Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2014

BPK RI Berikan Pernyataan Wajar tanpa Pengecualian

KETAPANG - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dalam penyampaian Pidato Bupati Ketapang, atas pengantar nota keuangan dan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014, yang telah mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI, berlangsung di Aula Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (6/7). Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Ketapang Budi Matheus Spd, didampingi dua wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir SH dan Qadarini SE, serta dihadiri Forkopimda, SKPD, serta para kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang.

Plt Sekda Drs H Mansyur yang membacakan Pidato Bupati Ketapang Drs Henrikus MSI, mengatakan bahwa penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014, adalah merupakan salah satu kewajiban konstitusional, yang harus dipenuhi oleh pihak eksekutif, untuk disampaikan kepada DPRD tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun 2014. "Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan tanggung jawab moral eksekutif, selaku pemegang mandat pelaksanaan anggaran daerah," kata

Mansyur.

Ia memaparkan sebagaimana diatur dalam pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pemeriksaan yang hasilnya disampaikan pada 3 Juli 2015, di mana Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2014 mendapat pernyataan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Hal ini berarti bahwa secara umum laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2014 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan," jelas Mansyur.

Gambaran umum realisasi pendapatan realisasi belanja realisasi pembiayaan serta pencapaian kinerja keuangan daerah, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014. Adapun realisasi pendapatan daerah



ISTIMEVA

PENYERAHAN DRAF: Plt Sekda Drs H Mansyur menyerahkan berkas LKPJ Pelaksanaan APBD 2014 kepada Ketua DPRD Budi Matheus, usai menyampaikan Pidato Bupati dalam Sidang Paripurna DPRD Ketapang, Senin (6/7).

tahun anggaran 2014, sebesar Rp1.546.921.315.879,89, di mana realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014 tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2014 sebesar Rp110.300.249.782,83 atau sebesar 112,67 persen dari target yang ditetapkan, PAD yang bersumber dari pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah.

Realisasi dana perimbangan Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014, sebesar Rp1.313.087.235.521,00 atau sebesar 99,44 persen dari target yang ditetapkan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dana bagi hasil bukan pajak dan alokasi umum dan dana alokasi khusus. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014, sebesar Rp123.533.830.576,06. Sementara realisasi belanja daerah tahun anggaran 2014, sebesar Rp1.577.793.986.138,48,

yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp583.178.943.848. Belanja langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp994.615.042.289,71. Bidang pembiayaan daerah per-31 desember 2014, sebesar Rp184.127.419.067,52, realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6 miliar, dan sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014, sebesar Rp147.254.748.808,94. (afi/ser)